

**EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS IDM DAN SDGs DESA:
STUDI KASUS RKPDes DESA RESAM LAPIS**

Yuri Marisa¹, Taryono², Wellyn Cesharina Meylan³, Syakirah Athiyyah Fitri⁴, Melani Noviantori Ramadhan⁵, Renata Deliana⁶, Naila Septa Ridhoni⁷

^{1,7}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

E-mail: yuri.marisa1059@student.unri.ac.id

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:**

Received :29-04-2026

Revised :18-05-2026

Accepted :26-05-2026

Keywords:

Village Development, Idm, Sdgs

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study aims to evaluate the alignment of the 2025 Village Government Work Plan (RKPDes) for Resam Lapis Village, Bengkalis Regency, with the Village Development Index (IDM) data and the Village Sustainable Development Goals (SDGs). The method used is an evaluative study employing a qualitative descriptive approach through document analysis and the analysis of secondary data from the official website of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration. The results of the study indicate that although Resam Lapis Village has achieved the status of an Independent Village with an IDM score of 0.8929, the formulation of the RKPDes remains dominated by a routine administrative approach characterized by copy-paste practices without strategically referencing IDM data and Village SDGs. Of the 18 Village SDGs, only 33% are fully accommodated, while 28% are not accommodated at all, particularly in the environmental aspects (Goals 12 and 13 with a score of 0.00). Budget allocation remains focused on physical infrastructure, while economic empowerment and social resilience receive insufficient attention. This study recommends integrating IDM and Village SDG data as a basis for planning, strengthening the

capacity of village officials, and reorienting the budget toward more productive and sustainable development.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2025 Desa Resam Lapis, Kabupaten Bengkalis dengan data Indeks Desa Membangun (IDM) dan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Metode yang digunakan adalah penelitian evaluasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi dokumentasi dan analisis data sekunder dari website resmi Kementerian Desa PDTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Desa Resam Lapis telah mencapai status Desa Mandiri dengan skor IDM 0,8929, penyusunan RKPDes masih didominasi pendekatan administratif rutin yang bersifat copy-paste tanpa mengacu pada data IDM dan SDGs Desa secara strategis. Dari 18 tujuan SDGs Desa, hanya 33% yang terakomodasi penuh, sementara 28% tidak terakomodasi sama sekali, terutama pada aspek lingkungan hidup (Tujuan 12 dan 13 dengan skor 0,00). Alokasi anggaran masih terpusat pada infrastruktur fisik, sementara pemberdayaan ekonomi dan ketahanan sosial kurang mendapat perhatian. Penelitian ini merekomendasikan integrasi data IDM dan SDGs Desa sebagai basis perencanaan, penguatan kapasitas aparatur desa, serta reorientasi anggaran menuju pembangunan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Desa sebagai unit pemerintahan paling dasar telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam posisi dan perannya dalam sistem pemerintahan (Assajid et al., 2024). Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan besar bagi kedudukan desa. Regulasi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma yang menempatkan desa tidak lagi sebagai objek administratif, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan, aspirasi masyarakat, serta kapasitas kelembagaan secara mandiri (Sutisna et al., 2026). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan kedudukan desa tersebut memberikan konsekuensi terhadap meningkatnya kewenangan desa dalam penyelenggaraan pembangunan. Menurut Singgih & Nirwana (2016) desa merupakan unit wilayah terkecil yang menghadapi

kerumitan isu sosial-ekonomi dan menjadi dasar dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan Pembangunan (Assajid et al., 2024). Oleh karena itu desa tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, tetapi memiliki kewenangan untuk merencanakan dan menentukan arah pembangunan sesuai dengan potensi serta kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan Permendesa Nomor 13 Tahun 2025 yang berbunyi pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan meningkatnya kewenangan desa dibutuhkan adanya sebuah sistem perencanaan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat desa dan dijalankan secara terarah, sistematis dan berkelanjutan. Menurut Permendesa Nomor 13 Tahun 2025 dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama pemerintah desa dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. RKPDDes merupakan hasil dari proses perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif dari bawah ke atas (*bottom-up*) serta menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi secara berjenjang, mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional (Adiansar et al., 2024).

Oleh karena itu RKPDDes memiliki peran strategis sebagai instrumen utama dalam memastikan keterpaduan antara kebutuhan pembangunan masyarakat desa dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional, termasuk dalam mendukung pencapaian program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa serta peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM). Menurut Castro-Arce & Vanclay (2020) pembangunan wilayah perdesaan di Indonesia menjadi salah satu faktor kunci dalam mempercepat realisasi agenda nasional menuju tercapainya SDGs (Al Azies, 2024).

Meskipun dalam kerangka regulasi desa merupakan subjek pembangunan yang mandiri, namun dalam praktik pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan desa masih menghadapi berbagai tantangan. Dimana terdapat fenomena duplikasi tanpa evaluasi (*copy paste*) dalam dokumen RKPDDes dari tahun ketahun. Perencanaan yang akuntabel mutlak membutuhkan basis data riil yang objektif agar kebijakan pembangunan berpijak pada realitas lapangan, bukan sekadar formalitas administratif (Riswara et al., 2024). Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya dominasi para elite desa (*elite capture*) sehingga hak dan kebutuhan masyarakat miskin termarginalkan, serta program pembangunan yang dilaksanakan tidak menyentuh ke akar permasalahan yang sebenarnya terjadi di desa tersebut.

Melihat adanya fenomena tersebut maka penelitian ini memfokuskan kajian pada Desa Resam Lapis yang berada di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis sebagai studi kasus. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengevaluasi dokumen perencanaan pada desa tersebut, serta menguji penerapan integrasi data SDGs

Desa dan IDM dalam penyusunan RKPDes. Sehingga dapat menjadi Solusi dalam memutus praktik copy paste dan dominasi para *elite capture*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Resam Lapis, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Metode yang digunakan adalah penelitian evaluasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menilai kesesuaian RKPDes dengan skor IDM dan SDGs. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah dokumen RKPDes. Selain itu, data sekunder berupa skor IDM dan SDGs diperoleh dari website resmi Kemendes.

Analisis data menggunakan model analisis yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan memfokuskan informasi dari dokumen RKPDes serta data skor IDM dan SDGs. Selanjutnya, penyajian data digunakan untuk memaparkan hasil evaluasi secara sistematis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan untuk mengetahui apakah RKPDes telah sesuai dengan skor IDM dan SDGs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Desa Resam Lapis adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Desa ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2012 sebagai hasil pemekaran dari Desa Selat Baru. Pemekaran tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan serta mendorong pemerataan pembangunan di tingkat desa. Secara administratif berdasarkan Surat Keputusan Desa Resam Lapis Tahun 2017, Desa Resam Lapis terdiri atas tiga dusun, yaitu Dusun Penawa Lapis, Dusun Lapis Timur dan Dusun Resam.

Analisis Status IDM Desa Resam Lapis

Menurut data Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Resam Lapis tahun 2021-2024, terlihat adanya perkembangan yang cukup signifikan dalam status dan capaian indeksinya. Pada tahun 2021 Desa Resam Lapis berada pada status berkembang dengan skor IDM sebesar 0,7071, ini menunjukkan bahwa desa telah memiliki dasar pembangunan yang cukup baik namun masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek, khususnya pada aspek ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan.

Pada tahun 2022 skor IDM meningkat menjadi 0,7262 dan status desa naik menjadi Maju. Kenaikan ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan skor Indeks Ketahanan Sosial Maju (IKS), ini menunjukkan bahwa perbaikan pada aspek sosial seperti akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar yang menjadi faktor utama dalam mendorong peningkatan status desa pada tahun 2022.

Tahun 2023 skor IDM meningkat cukup tajam menjadi 0,8373 dan status desa berubah menjadi Mandiri. Peningkatan ini didukung oleh kenaikan skor IKE dan IKL

yang cukup besar dibanding tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya penguatan pada sektor ekonomi desa serta kualitas lingkungan dan infrastruktur pendukung.

Pada tahun 2024 skor IDM kembali meningkat menjadi 0,8929 dengan status desa tetap Mandiri. Peningkatan ini didorong oleh naiknya skor IKE dan terutama IKL yang mencapai 1,0000. Sementara IKS tetap stabil pada angka tinggi. Secara keseluruhan periode 2021-2024 menunjukkan bahwa Desa Resam Lapis mengalami perkembangan yang bertahap dan berkelanjutan.

Analisis RKPDes Desa Resam Lapis

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2024 Desa Resam Lapis memperlihatkan susunan perencanaan yang sudah cukup sistematis, terutama dari sisi pembagian bidang dan rincian kegiatannya. Secara umum program-program yang direncanakan dibagi ke dalam empat bidang utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan total anggaran sebesar Rp 4.799.936.119. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk bidang pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang secara keseluruhan menyerap $\pm 80\%$ dari total anggaran.

Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, honorarium, serta biaya operasional perangkat desa dan BPD. Selain itu terdapat pengeluaran untuk pengadaan perlengkapan kantor, kendaraan dinas, perangkat lunak administrasi berbasis digital serta pembaruan data SDGs. Pada bidang pembangunan desa kegiatan yang paling menonjol adalah pembangunan dan lanjutan semenisasi jalan lingkungan di beberapa dusun. Selain itu terdapat pembangunan sarana umum seperti MCK, penerangan jalan, sekretariat BUMDes, serta fasilitas keagamaan.

Untuk bidang pembinaan kemasyarakatan, alokasi anggaran tergolong kecil, yaitu sekitar 5,4% dari total anggaran. Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk mendukung operasional lembaga kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna, LPMD, Posyandu, lembaga keagamaan, serta kelompok seni dan budaya. Sedangkan pada bidang pemberdayaan masyarakat yang memperoleh sekitar 13% anggaran, kegiatan difokuskan pada pelatihan, bantuan hibah sosial-keagamaan, dukungan kegiatan MTQ dan olahraga, serta penyertaan modal BUMDes dan program ketahanan pangan desa.

Dari penjabaran di atas maka dapat dipahami bahwa RKPDes Tahun 2024 Desa Resam Lapis masih menunjukkan pola pembangunan yang berfokus pada penguatan infrastruktur dasar dan operasional pemerintahan. Upaya pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakat sudah mulai diarahkan, namun belum menjadi fokus utama dalam struktur anggaran. Apabila desa ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan, peningkatan alokasi untuk kegiatan yang bersifat produktif dan pengembangan potensi ekonomi desa dapat menjadi langkah strategis yang perlu dipertimbangkan.

Evaluasi Kesesuaian RKPDes dengan IDM

Berdasarkan data IDM 2024, Desa Resam Lapis berada pada kategori Desa Mandiri dengan nilai IDM 0,8929. Kondisi ini menunjukkan bahwa desa telah memiliki tingkat ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang relatif tinggi. Dimensi dengan skor tertinggi adalah IKL dengan skor 1,0000 lalu disusul oleh IKE dengan skor 0,850 dan terakhir adalah IKS dengan skor 0,8286. Meski demikian capaian IDM yang tinggi tidak secara otomatis mencerminkan bahwa perencanaan pembangunan desa khususnya RKPDes telah sepenuhnya berbasis pada indikator IDM.

Untuk menelaah lebih jauh sejauh mana program RKPDes Desa Resam Lapis Tahun 2025 telah merespons capaian dan kesenjangan indikator IDM tersebut, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kesesuaian antara program yang direncanakan dengan indikator-indikator yang menjadi penentu status desa. Evaluasi ini penting dilakukan mengingat status Desa Mandiri bukanlah titik akhir pembangunan, melainkan fondasi untuk mendorong desa menuju kondisi yang lebih berdaya dan berkelanjutan.

Evaluasi kesesuaian ini dilakukan dengan memetakan setiap program dan kegiatan dalam RKPDes ke dalam tiga dimensi IDM, yakni Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Setiap program ditelaah berdasarkan relevansinya terhadap indikator IDM yang belum optimal, sehingga dapat diidentifikasi secara jelas program mana yang telah selaras, program yang hanya sebagian terpenuhi, dan program yang sama sekali belum terakomodasi dalam perencanaan desa.

Berdasarkan kerangka analisis tersebut dapat digambarkan bahwa RKPDes Desa Resam Lapis Tahun 2025 belum disusun dengan tujuan yang jelas untuk meningkatkan capaian IDM. Program yang direncanakan lebih banyak melanjutkan kegiatan rutin dari tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan merancang langkah yang secara khusus menargetkan indikator IDM yang masih lemah. Akibatnya cukup banyak indikator IDM yang tidak terjawab, bukan semata karena keterbatasan anggaran, tetapi karena IDM belum benar-benar dijadikan acuan utama dalam proses penyusunan RKPDes Resam Lapis.

Pada dimensi IKS yang memperoleh skor terendah yakni 0,8286 dengan alokasi anggaran RKPDes di bidang pemberdayaan masyarakat mencapai Rp622.495.798 menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran tersebut terserap untuk kegiatan operasional rutin seperti posyandu, insentif kader, dan kegiatan keagamaan. Sementara itu program yang secara langsung mendorong peningkatan indikator IKS seperti perluasan jaminan kesehatan dan pendidikan kesetaraan belum terakomodasi secara memadai. Di bidang pendidikan meskipun aksesibilitas fisik ke seluruh jenjang dari PAUD hingga SMA sudah terpenuhi dengan baik. Namun tantangan utama sesungguhnya seperti peningkatan kualitas pembelajaran dan pendidikan kesetaraan bagi warga desa yang belum menyelesaikan pendidikan formal belum terjawab secara strategis melalui program-program di dalam RKPDes.

Dalam dimensi IKE dengan skor IDM 0,850 yang memiliki anggaran terbesar yaitu Rp1.830.121.148 sangat didominasi oleh program pembangunan infrastruktur jalan dan drainase. Namun hal tersebut belum disertai program pendukung yang memastikan infrastruktur tersebut mampu mendorong aktivitas ekonomi, sehingga manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat berpotensi tidak optimal.

Sementara itu, pada dimensi IKL yang mencatat skor sempurna 1,0000 masih belum ditemukan program mitigasi dan tanggap bencana. Padahal program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Resam Lapis, mengingat kondisi geografis desa yang rentan terhadap bencana tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa risiko lingkungan belum menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan desa, padahal indikator ini sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan capaian skor IDM yang sudah sangat baik tersebut.

Capaian status Desa Resam Lapis sebagai Desa Mandiri berdasarkan IDM tahun 2024 secara umum menunjukkan bahwa desa tersebut memiliki tingkat ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang relatif baik. Namun capaian tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan bahwa proses perencanaan pembangunan desa khususnya dalam penyusunan RKPDes telah sepenuhnya berlandaskan pada indikator IDM. Padahal sejatinya nilai IDM berfungsi sebagai alat diagnosis yang menunjukkan posisi dan ketimpangan capaian antar dimensi pembangunan desa, sementara RKPDes seharusnya disusun sebagai respons strategis terhadap diagnosis tersebut melalui penetapan program dan kegiatan yang terarah. Namun demikian, RKPDes Desa Resam Lapis Tahun Anggaran 2025 masih cenderung bersifat normatif dan berorientasi pada keberlanjutan kegiatan rutin sehingga belum secara strategis diarahkan untuk menjawab kesenjangan capaian indikator IDM. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara data IDM sebagai alat evaluasi pembangunan dengan pemanfaatannya dalam proses perencanaan yang berpotensi menghambat pembangunan desa secara berkelanjutan.

Evaluasi Kesesuaian RKPDes dengan SDGs Desa

Berdasarkan publikasi resmi skor SDGs Desa SID Kemendesa 2024, Desa Resam Lapis memperoleh skor rata-rata sebesar 47,20 dari 18 tujuan SDGs Desa. Skor ini mencerminkan kondisi yang cukup beragam antara semua tujuan yang ada. Terdapat beberapa tujuan yang telah mencapai angka sangat baik seperti Tujuan 7 (Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan) dengan skor 98,96 dan Tujuan 16 (Desa Damai Berekadilan) dengan perolehan skor 88,74. Namun disisi lain terdapat tujuan yang sama sekali belum terpenuhi yakni Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan) dan Tujuan 13 (Desa Tanggap Perubahan Iklim) yang keduanya mencatat skor 0,00. Kesenjangan capaian yang cukup lebar antar tujuan ini menjadi sinyal penting bahwa pembangunan Desa Resam Lapis masih berjalan tidak merata dan belum menyentuh seluruh dimensi keberlanjutan yang sesuai dengan kerangka SDGs Desa.

Kondisi ini seharusnya menjadi acuan strategis dalam penyusunan RKPDes Desa Resam Lapis, dimana tujuan-tujuan SDGs Desa dengan skor terendah seperti Tujuan 4 (Pendidikan Desa Berkualitas) dengan skor 31,35 dan Tujuan 8 (Pertumbuhan Ekonomi

Merata) dengan skor 39,65 seharusnya mendapat perhatian dan intervensi program yang lebih terarah.

Untuk melihat sejauh mana RKPDes Desa Resam Lapis Tahun 2025 merespon kesenjangan capaian SDGs Desa, dilakukan pemetaan kesesuaian program terhadap 18 tujuan SDGs Desa. Berikut lampiran hasil analisis ketercakupan program RKPDes Desa Resam Lapis tahun 2025 terhadap tujuan SDGS Desa.

Tabel 1. Rekapitulasi Tingkat Ketercakupan Program RKPDes Desa Resam Lapis Tahun 2025 terhadap Tujuan SDGs Desa

Kategori	Jumlah	Persentase
Terakomodasi	6 tujuan	33%
Sebagian Terakomodasi	7 tujuan	39%
Tidak Terakomodasi	5 tujuan	28%

Sumber: Data diolah

Kondisi diatas mengindikasikan bahwa lebih dari setengah tujuan SDGs Desa belum dijawab secara optimal dalam RKPDes, bahkan hampir sepertiganya belum tersentuh sama sekali. Angka capaian tersebut menunjukkan bahwa RKPDes Desa Resam Lapis belum benar-benar menggunakan SDGs Desa sebagai kerangka perencanaan, melainkan masih berjalan dengan pola kegiatan rutin yang sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya. Namun fakta menariknya adalah tujuan SDGs Desa yang sama sekali tidak tersentuh oleh RKPDes Desa Resam Lapis mengelompok pada satu tema yang sama yaitu lingkungan hidup. Tujuan 12, 13, 14, dan 15 yang mencakup pengelolaan sampah, mitigasi bencana, lingkungan laut, dan lingkungan darat, semuanya tidak memiliki satu pun program dalam RKPDes. Padahal keempat tujuan ini juga mencatat skor yang rendah bahkan ada yang nol, yang artinya kondisi di lapangan memang belum baik dan justru membutuhkan perhatian paling besar. Ini menunjukkan bahwa isu lingkungan hidup belum dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab pembangunan desa, padahal dampaknya langsung dirasakan oleh warga sehari-hari.

Sebaliknya, tujuan yang sudah terakomodasi penuh justru adalah tujuan yang skornya sudah tinggi seperti Tujuan 7 (98,96), Tujuan 16 (88,74), Tujuan 17 (71,96), dan Tujuan 18 (72,03). Ini menunjukkan pola yang kurang tepat dalam perencanaan, di mana desa cenderung memperkuat yang sudah kuat dan mengabaikan yang masih lemah. Dalam konteks pembangunan, seharusnya alokasi program justru diprioritaskan untuk menutup kesenjangan, bukan mempertahankan capaian yang sudah baik.

Dari sisi ekonomi, Tujuan 8 tentang Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata hanya mencatat skor 29,81 dan menjadi salah satu yang terendah, namun program yang ada hanya berupa pelatihan lepas tanpa ekosistem pendukung yang memadai. Tidak ada program penguatan BUMDes yang terstruktur, akses permodalan, maupun pendampingan pascapelatihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelatihan selama ini berjalan tanpa hasil yang bisa diukur karena tidak ada program lanjutannya. Hal yang

sama berlaku pada Tujuan 1 (46,42) dan Tujuan 10 (39,65) yang keduanya berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan. Program yang ada hanya berupa bantuan sosial rutin yang sifatnya konsumtif, bukan program yang membangun kemandirian atau meningkatkan kapasitas ekonomi warga secara berkelanjutan.

Padahal RKPDes ini mengalokasikan anggaran terbesar di bidang infrastruktur dan pibungan desa yakni Rp1,83 miliar, sementara tujuan SDGs Desa yang paling banyak tidak terakomodasi justru ada di bidang lingkungan dan pemberdayaan ekonomi yang anggarannya jauh lebih kecil. Ketimpangan alokasi ini memperjelas bahwa RKPDes Desa Resam Lapis masih disusun dengan pendekatan pembangunan fisik sebagai prioritas utama, sementara pembangunan manusia dan lingkungan diperlakukan sebagai pelengkap.

Analisis Permasalahan dan Tantangan Perencanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap RKPDes Desa Resam Lapis, terdapat beberapa permasalahan mendasar dalam proses perencanaan pembangunan desa yang berimplikasi pada lemahnya pemanfaatan data sebagai dasar penentuan prioritas program. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data IDM dan SDGs Desa belum terintegrasi secara optimal dalam perencanaan RKPDes Desa Resam Lapis.

Data telah tersedia, namun pemanfaatannya masih terbatas sebagai dokumen pelaporan administratif dan belum dijadikan dasar dalam penentuan prioritas program RKPDes. Akibatnya perencanaan pembangunan desa belum sepenuhnya disusun berdasarkan analisis kebutuhan berbasis data.

2. Dominasi Pola Perencanaan Rutin dan Berulang

Program yang dicanangkan dari tahun 2024-2025 menunjukkan kecenderungan yang relatif sama. Pola ini mengindikasikan bahwa penyusunan RKPDes lebih dipengaruhi oleh kebiasaan perencanaan dankemudahan administratif dibandingkan upaya merespons persoalan pembangunan yang teridentifikasi melalui data secara strategis.

3. Keterbatasan Kapasitas dan Fleksibilitas Perencanaan Desa

Proses Perencanaan di Desa Resam Lapis masih bergantung pada sumber pendanaan yang terikat petunjuk teknis sehingga membatasi ruang inovasi desa. Hal ini menjadikan desa lebih cenderung sebagai pelaksana program daripada perencana pembangunan yang mandiri dan responsif terhadap kondisi lokal.

Implikasi Perencanaan dan Rekomendasi Perbaikan

Evaluasi terhadap RKPDes Desa Resam Lapis tahun 2025 menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan desa masih didominasi oleh pendekatan administratif rutin yang mengabaikan integrasi data Indeks Desa Membangun (IDM) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa secara sistematis. Sehingga prioritas program cenderung berulang setiap tahun melalui praktik *copy-paste* dari dokumen tahun sebelumnya.

Secara IDM Desa Resam Lapis memiliki skor yang tinggi sehingga berada pada kategori desa mandiri, dengan skor terendah pada IKS yakni sebesar 0,8286. Angka ini

dinilai sudah tinggi dan bagus, namun tetap diperlukan upaya agar skor IDM Desa Resam Lapis terutama pada IKS terus mengalami peningkatan serta menjaga status sebagai desa mandiri. Dalam upaya untuk meningkatkan IKS, RKPDes Desa Resam Lapis masih berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik sehingga diperlukan diversifikasi program yang lebih menasar pada aspek ketahanan sosial non-fisik. Dengan mengalihkan fokus dari sekadar pembangunan fisik ke pembangunan manusia, Desa Resam Lapis tidak hanya akan mempertahankan status kemandiriannya, tetapi juga mewujudkan tatanan sosial yang lebih tangguh dan berkelanjutan sesuai dengan mandat SDGs Desa.

Selain itu kesenjangan capaian skor SDGs Desa juga membawa implikasi strategis bagi arah pembangunan Desa Resam Lapis ke depan. Dimana diantara 18 tujuan SDGs Desa masih terdapat tujuan yang tidak terakomodasi atau memiliki skor 0,00, yakni tujuan 12 (Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan) dan tujuan 13 (Desa tanggap perubahan iklim). Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya literasi warga dan aparatur desa terhadap isu lingkungan, serta belum tersedianya sistem pendataan yang mampu menangkap aktivitas-aktivitas berbasis swadaya masyarakat dalam menjaga ekosistem desa.

Keberadaan skor 0,00 pada indikator krusial seharusnya menjadi sinyal darurat bagi perencana pembangunan desa. Implikasinya penyusunan RKPDes tidak boleh lagi hanya berdasarkan usulan yang bersifat rutin atau *copy-paste* dari tahun sebelumnya. Diperlukan adanya kebijakan baru seperti melalui integrasi program pengelolaan sampah berbasis komunitas atau desa tanggap bencana untuk mengisi kekosongan capaian pada aspek lingkungan. Tanpa adanya sinkronisasi antara data SDGs dengan alokasi APBDes, maka dokumen perencanaan hanya akan menjadi pemenuhan syarat birokrasi tanpa memberikan dampak transformasi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Desa Resam Lapis.

Selain itu rendahnya skor pada Tujuan 4 (Pendidikan) dan Tujuan 8 (Pertumbuhan Ekonomi) memberikan implikasi bahwa investasi sumber daya manusia dan penguatan sektor riil di desa masih lemah. Hal ini menunjukkan adanya gap antara status Desa Mandiri secara administratif dengan kualitas kemandirian ekonomi masyarakat di lapangan. Implikasi pembangunan yang muncul adalah urgensi bagi Pemerintah Desa untuk melakukan reorientasi anggaran, dari yang sebelumnya bersifat pembangunan fisik umum menjadi pembangunan yang bersifat produktif dan mencerdaskan.

Beberapa rekomendasi perbaikan yang ditawarkan untuk menjawab beberapa permasalahan di Desa Resam Lapis terutama terkait penyusunan RKPDes adalah sebagai berikut ini:

1. Perbaiki tata kelola data dan pelaporan kegiatan terhadap SDGs Desa.

Yakni dengan melakukan pendataan terhadap kearifan lokal dan swadaya masyarakat (seperti gotong royong pembersihan drainase atau praktik pertanian organik) yang selama ini sudah berjalan namun belum terinput ke dalam sistem Dashboard SDGs

Kemendesa. Hal ini bertujuan agar potret administratif desa selaras dengan realitas sosiologis di lapangan.

2. Optimalisasi investasi Sumber Daya Manusia (SDM).
Meningkatkan fungsi layanan Posyandu menjadi Posyandu Remaja dan Anak yang tidak hanya melakukan penimbangan fisik, tetapi juga pemantauan tumbuh kembang kognitif melalui pengadaan alat bermain yang edukatif dan literasi gizi.
3. Penguatan sektor ekonomi melalui peran BUM Desa dan Koperasi Desa.
Dengan melakukan evaluasi kinerja BUM Desa dan melakukan reorientasi unit usaha agar lebih menyentuh rantai pasok produk unggulan desa. Alokasi modal usaha sebaiknya diarahkan pada penyediaan alat teknologi tepat guna untuk pengolahan pasca-panen atau jasa pemasaran produk UMKM lokal, sehingga terjadi peningkatan nilai tambah ekonomi yang dirasakan langsung oleh warga.
4. Penguatan kapasitas dan insentif bagi tim pendata SDGs Desa.
Untuk memastikan tingkat akurasi Pemerintah Desa dapat menerapkan sistem insentif berbasis kinerja bagi pendata yang berhasil melakukan verifikasi dan validasi data lapangan hingga status "terunggah" (*uploaded*) di aplikasi SDGs Desa. Dengan data yang mutakhir dan valid perencanaan pembangunan di tahun berikutnya akan memiliki basis argumentasi yang kuat dan tidak lagi sekadar menggugurkan kewajiban administratif.
5. Perencanaan berbasis data untuk memutus siklus copy paste RKPDes.
Praktik penyusunan RKPDes yang bersifat rutin dan repetitif (*copy paste*) merupakan dampak dari lemahnya integrasi data objektif ke dalam alur birokrasi desa. Untuk mentransformasi hal tersebut, diperlukan standarisasi baru dalam tahapan perencanaan.

KESIMPULAN

Evaluasi terhadap RKPDes Desa Resam Lapis tahun 2025 menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan desa masih didominasi pendekatan administratif rutin yang mengabaikan integrasi data IDM dan SDGs Desa secara sistematis, sehingga prioritas program cenderung berulang melalui praktik *copy-paste*.

Meskipun Desa Resam Lapis mencapai status mandiri dengan skor IDM 0,8929 (terendah pada IKS 0,8286), RKPDes belum merespons kesenjangan indikator secara strategis, dengan fokus dominan pada infrastruktur fisik daripada ketahanan sosial non-fisik dan pemberdayaan ekonomi.

Kesenjangan SDGs Desa mencolok pada tujuan lingkungan (skor 0,00 untuk tujuan 12 dan 13) yang tidak terakomodasi sama sekali, sementara hanya tujuan yang lain terpenuhi sepenuhnya, mengindikasikan ketidakseimbangan alokasi anggaran dan lemahnya basis data riil dalam perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansar, Alwi, S., & Ilyas. (2024). Analisis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Di Desa Margajaya Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana. *Jurnal Ekonomi (JE)*, 9(1), 91–98. <http://jurnal-ekonomi.uho.ac.id>
- Al Azies, H. (2024). AI-Based Models for Identifying Underdeveloped Villages in Indonesia's Rural Development. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 5(3), 192–202. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v5i3.611>
- Assajid, S. R., Khoiron, & Sekarsari, R. W. (2024). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Desa: Langkah Strategis Pemenuhan SDGs Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 10(2), 170–180. <https://doi.org/doi.org/10.21776/ub.jiap.2024.010.02.5>
- Riswara, A., Sihabudin, A. A., & Yuliani, D. (2024). Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Otonomi*, 1(2).
- Sutisna, A., Wulansari, R. D., & Furqon, W. (2026). Desa Sebagai Subyek Pembangunan: Studi Desentralisasi, Kelembagaan, dan Partisipasi Warga. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 17–38. <https://doi.org/doi.org/10.25157/moderat.v12i1.5745>